

---

## **Analisis Upaya Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Melalui Tamping Di Lembaga Pemasaryakatan**

**Ferdinand Novereo Sebayang<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: [amirhusin0064@gmail.com](mailto:amirhusin0064@gmail.com)<sup>1</sup>, [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa efektif tamping di Lembaga Pemasaryakatan dalam upaya meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban serta menganalisis kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal) serta peluang dan ancaman (lingkungan eksternal) di Lembaga Pemasaryakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala/kelemahan internal maupun peluang/ancaman eksternal yang dihadapi lembaga pemasaryakatan dalam meminimlisir gangguan keamanan dan ketertiban sehingga didapatkan beberapa kesimpulan yaitu : Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan peran tamping tidak berbeda dengan peran pekerja. Tamping sifatnya membantu petugas dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tamping tidak memiliki otorita lebih selain melaksanakan apa yang telah diperintahkan untuk menjadi tugasnya. Tamping memiliki tanggungjawab lebih daripada pekerja dalam hal sebagai penanggungjawab/kordinator.

**Kata Kunci:** *Tamping, Gangguan Keamanan*

### **Abstract**

This study aims to find out how effective tamping in prisons is in an effort to minimize disturbances to security and order and to analyze strengths and weaknesses (internal environment) as well as opportunities and threats (external environment) in prisons. The research method used is descriptive with data collection techniques through observation, interviews, library research and the internet. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study indicate that there are several internal constraints/weaknesses as well as external opportunities/threats faced by correctional institutions in minimizing security and order disturbances so that several conclusions are obtained, namely: From the findings in the field, the role of tamping is not different from the role of workers. Tamping is helping officers in carrying out work in accordance with their fields. Tamping has no more authority than to do what he has been ordered to do. Tamping has more responsibilities than workers in terms of being in charge/coordinator.

**Keywords:** *Tamping, Security Disturbance*

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 sampai 2021 berawal sejak datangnya virus Covid-19, terdapat banyak insiden gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif, mengingat beberapa konflik sampai menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya beberapa personel petugas pemasyarakatan, narapidana dan tahanan

Secara langsung, gangguan keamanan dan ketertiban yang demikian berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di Lapas. Penciptaan suasana aman dan tertib, yang terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan, memperoleh langkah mundur dengan berbagai aksi kekerasan tersebut. Secara tidak langsung, pada konteks yang lebih luas, gangguan keamanan dan ketertiban memiliki dampak pula kepada masyarakat umum, mengingat beberapa pelayanan terhadap masyarakat di Lapas terganggu dan berakibat pelarian narapidana pada saat bentrokan terjadi. Berangkat dari pemahaman umum tersebut, gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia

Peran tamping yang membantu petugas mengorganisir warga binaan mengikuti program pendampingan. Keberadaan tamping sangat dibutuhkan selain karena minimnya petugas, tamping sebagai kordinator serta sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan warga binaan secara aktif terhadap program pendampingan di Lapas. Sehingga tamping diharapkan mampu mengordinir dan berkomunikasi dengan baik sebagai penghubung antara petugas dengan sesama warga binaan sehingga program pendampingan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Seperti yang terungkap pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnawati (2014) bahwa tamping berperan aktif pada kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta berperan sebagai fasilitator antara narapidana atau tahanan dengan petugas atas dasar saling percaya, begitu juga hubungan antara napi dengan keluarga warga binaan, tamping diberi peran dan terlibat terutama untuk memberi kemudahan kepada sesama warga binaan. Agar dapat berkordinasi dengan petugas Lapas, tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, bimbingan kerja dan pelatihan aneka ketrampilan, tamping juga berperan dalam mengatasi minimnya anggaran dan keterbatasan personil di Lapas serta memudahkan proses pembinaan. Dengan memberikan peran dan tanggungjawab kepada tamping, dapat pula mempercepat proses adaptasi dan pemulihan serta rehabilitasi narapidana yang berperan tamping, sebelum diterjunkan ke masyarakat.

Keberadaan tamping sendiri menjadi resmi karena diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2013 mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakat, yang menyatakan bahwa Tamping adalah narapidana yang membantu petugas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas. Tamping yang dipilih harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah mempunyai bakat memimpin dan mempunyai jiwa sosial.

Sementara itu tamping mempunyai kewajiban untuk berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi warga binaan lainnya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan, menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas, menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan dan hormat dan taat kepada petugas.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan atau apa adanya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut: Penelitian Lapangan Dimana pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan tujuan dapat melihat objek penelitian yang dituju yaitu dengan menggunakan metode:(1) Pengamatan ,(2) Wawancara .Penelitian Kepustakaan Dimana pada penelitian ini menggunakan data yang telah dibukukan, berupa laporan dan hasil penelitian terdahulu yang disebut data sekunder.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Studi tentang gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas sudah jamak dilakukan di kalangan akademisi maupun praktisi masyarakat (correction) di berbagai negara. Secara umum, terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam menggambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, baik kekerasan maupun non-kekerasan, di dalam Lapas, yaitu: model perampasan (deprivation model), model pembawaan (importation model), dan model situasional (situational model).

Teori model perampasan mendefinisikan bahwa lingkungan penjara dan kehilangan kebebasan menyebabkan trauma psikologis mendalam yang oleh karenanya psikologi narapidana membentuk budaya deviant (menyimpang) yang dapat memicu kekerasan. Adapun menurut Gresham Sykes, terdapat lima perampasan yang dijatuhkan dalam lingkungan penjara, yakni: the loss or deprivation of liberty, the loss or deprivation of goods and services, the loss or deprivation of heterosexual relationships, the loss or deprivation of autonomy, and the loss or deprivation of security.

Selanjutnya, teori model pembawaan menekankan pada apa saja yang dibawa narapidana ke dalam penjara: riwayat mereka, atribut personal dan jaringan sosial, termasuk jaringan dengan kelompok kriminal. Hal-hal tersebut yang dianggap dapat memicu terjadinya konflik di Lapas. Melalui perspektif ini, penjara dilihat sebagai sebuah komposisi dari berbagai macam sub-kultur yang saling berlawanan satu sama lain. Terkait hal tersebut, Irwin dan Cressey mengembangkan sebuah tipologi sub-kultur narapidana yang saling berkonflik antara satu dengan yang lain, meliputi: pertama, subkultur pencuri (thief), yang memiliki indikasi: *“adhered to norms and values developed and adopted by thieves in the criminal world. With central values such as trustworthiness and dependability, it is maintained that these offenders were most likely to refer to fellow thieves in the prison as their primary reference group”* ; kedua, sub-kultur terpidana (convicts), yakni mereka yang dibesarkan di dalam sistem penjara, yang dalam teori perampasan memiliki dampak yang sangat besar terhadap sub-kultur ini; ketiga, sub-kultur straights, yakni narapidana yang hanya sekali melakukan tindak pidana, sehingga mereka mencoba untuk memperoleh sebanyak-banyaknya melalui program pembinaan dan pendidikan di dalam penjara.

Terakhir, teori model situasional merupakan konsep pelengkap dari kedua teori sebelumnya, yakni tidak hanya memfokuskan diri pada kesakitan akibat perampasan, ataupun konstruksi kultur penjara yang saling berkonflik, tetapi juga mencoba melihat faktor-faktor penyebab kekerasan dalam hal karakteristik narapidana, faktor struktural dan situasi penjara, praktik manajemen penjara, serta pengaruh di lingkungan luar penjara seperti kunjungan keluarga.

Temuan tersebut mengafirmasi simpulan dari berbagai penelitian kuantitatif bahwa faktor-faktor pembawaan (importation) sangat dominan memiliki pengaruh terhadap terjadinya konflik baik dengan kekerasan maupun non-kekerasan antarnarapidana. Berbagai faktor pembawaan tersebut tampak sangat dominan dalam membentuk sub-kultur dalam berbagai penjara di Indonesia. Disinilah peran tamping sangat diperlukan terhadap pengawasan serta analisis resiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Terdapat suatu komponen di dalam sebuah ikatan antara tamping dengan pegawai yaitu komponen komunikasi terhadap pegawai dengan tamping. Ada istilah pengirim dan penerima pesan. Istilah ini digunakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber sekaligus penerima.

Dibanding dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi interpersonal dinilai paling ampuh untuk mengubah sikap, perilaku kepercayaan dan opini komunikasi. Hal ini disebabkan komunikasi dilakukan dengan tatap muka. Namun demikian, kondisi di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan situasi para penghuni yang kelihatannya tampak tenang, tetapi sebenarnya di dalam Lapas terdapat konflik batin yang bergejolak dan terselubung yaitu adanya konflik antara penghuni dengan penjaga, dan konflik dengan dirinya sendiri maupun dengan keluarga yang berada di luar lingkungan tersebut.

Sehingga potensi perilaku sensitive sangat tinggi sehingga muncul berbagai perilaku agresif baik dalam bentuk fisik ataupun psikologis berpotensi terjadi. Perasaan-perasaan tertekan dan teraniaya ini dapat memicu terjadinya perilaku yang berpotensi konflik dalam diri seseorang maupun konflik antar pribadi. Berkaitan dengan konflik dalam diri seseorang maupun konflik antar pribadi dan antar kelompok, dalam Lapas menurut Soerjobroto (1981:18) “konflik dengan kekerasan ini sangat sering terjadi dan sangat berpotensi terjadi meskipun orang di luar penjara sulit mengetahuinya”. Permasalahan di Lapas juga terkait dengan tingginya biaya hidup di dalam Lapas yang cukup mahal, dimana harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari lebih mahal ketimbang di luar Lapas.

Komponen komunikasi yang bertindak sebagai pengirim dan penerima adalah para petugas Pemasarakatan dan tamping yang berperan dalam menganalisis kejadian gangguan keamanan ketertiban di lembaga pemsarakatan. Salah satu fungsi petugas Pemasarakatan adalah merubah dan mengembangkan serta menjaga keamanan dan ketertiban bagi setiap warga binaan sehingga mereka mampu mengubah diri serta merasa aman di dalam lembaga kemasyarakatan namun dengan jumlah serta dengan kondisi yang tidak memungkinkan dari beberapa warga binaan dengan kasus yang berbagai macam dan serta dengan pemikiran manusia yang beda-beda sehingga para petugas menggunakan atau bekerjasama dengan tamping untuk mengatasi serta menganalisis dan memberikan suatu analisa agar keamanan ketertiban selalu berjalan lancar. Mengapa menggunakan samping karena na di setiap apa sebenarnya menyediakan seorang wali napi yang ditunjuk dari petugas Pemasarakatan titik setiap wali biasanya mengampu kurang lebih 10 narapidana polri bertugas mengawasi sikap perilaku tingkah laku dan mengamati perkembangan serta menilainya. Namun tidak semua narapidana dapat dinilai serta diawasi satu persatu dalam 24 jam nonstop. Oleh karena itu pegawai menggunakan tamping untuk mengikuti pendampingan dalam melakukan analisa terhadap gangguan keamanan ketertiban di lembaga pemsarakatan.

## **SIMPULAN**

Secara umum peran tamping mampu sebagai sarana warga binaan lapas untuk menumbuhkan konsep diri yang positif. Melalui perannya sebagai tamping, warga binaan menunjukkan perilaku yang positif, kesediaan untuk melayani, komunikasi yang terbuka dan empatik, menunjukkan ketrampilan komunikasi interpersonal yang positif serta kepercayaan diri. Kondisi ini tentunya dapat memberikan manfaat positif bagi warga binaan dalam memperbaiki trauma psikologis yang muncul karena kasus pidana yang dialami ataupun juga stress karena menjalani masa hukuman di lapas .

Model komunikasi interpersonal yang berlaku oleh tamping adalah transaksi dagang. Para warga binaan memainkan peranannya sesuai tuntutan peranan (role demand) yang berlaku antara lain berperilaku baik, menghindari konflik, mampu menjalankan

tanggungjawab yang diberikan agar bisa segera terlepas dari masa hukuman melalui program remunerasi atau PB (Pembebasan Bersyarat).

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan peran tamping tidak berbeda dengan peran pekerja. Tamping sifatnya membantu petugas dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Tamping tidak memiliki otorita lebih selain melaksanakan apa yang telah diperintahkan untuk menjadi tugasnya. Tamping memiliki tanggungjawab lebih daripada pekerja dalam hal sebagai penanggungjawab/kordinator.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- DeVito, Joseph A. (2011). Komunikasi antar manusia, edisi 5. Alih Bahasa : Ir. Agus Maulana, M.S.M. Jakarta : Karisma Publishing Group.
- <http://ramalanintelijen.net> diakses pada tanggal 7 Desember 2014 jam 2:51 Senjaya, Sasa Djuarsa, 2007, Teori Komunikasi, Jakarta : Universitas Terbuka
- Isnawati (2014). Peran Tamping dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda. eJournal Ilmu Sosiatri, [ejournal.sos.fisipunmul.org](http://ejournal.sos.fisipunmul.org)
- Jiang, Shanhe, Inmate Misconduct: A Test of the Deprivation, Importation, and Situational Models, *The Prison Journal* September 2002.
- Liliweri, Alo, (1997), Komunikasi Antarpribadi . Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramalan intelijen bersama Prayitno Ramelan, Antara kerusuhan Lapas Indonesia dengan Penjara Abu Ghraib Irak.